

PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BUMDES KALONGAN

Amir Mahmud^{1*}, Widya Hary Cahyati², Wara Dyah Pita Rengga³, Lilis Hartati⁴,
Nurdian Susilowati⁵

^{1,2,3,5}Universitas Negeri Semarang, Indonesia, ⁴Universitas Tidar

^{1*}amirmahmud@mail.unnes.ac.id

Abstract

This community service program aims to address the financial management challenges faced by BUMDes Kalongan Jaya Mandiri, which could potentially hinder its business sustainability. Although BUMDes plays a strategic role in driving the village economy, the operational complexity of its various business units (duck egg production, goat farming, and waste management) requires a transparent and accountable financial reporting system. The Participatory Rural Appraisal (PRA) method was used to ensure the active participation of BUMDes managers. The project was divided into two phases: simple accounting training and intensive mentoring. The training focused on educating managers on easy-to-understand financial record-keeping, while the mentoring helped them prepare inventory reports, cash inflow and outflow statements, and fixed asset lists. The results showed a significant improvement in the managers' understanding and ability to create structured financial reports. This not only enhanced operational efficiency and accountability but also served as a foundation for better decision-making and increased trust from the community and other stakeholders.

Keywords: *accountability; BUMDes; management; transparency.*

Abstrak

*Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh BUMDes Kalongan Jaya Mandiri, yang berpotensi menghambat keberlanjutan bisnisnya. Meskipun BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa, kompleksitas operasional dari berbagai unit usaha (telur bebek, peternakan kambing, dan pengelolaan sampah) memerlukan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) digunakan untuk memastikan partisipasi aktif pengelola BUMDes. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua tahap: pelatihan akuntansi sederhana dan pendampingan intensif. Pelatihan berfokus pada edukasi pencatatan keuangan yang mudah dipahami, sementara pendampingan membantu pengelola menyusun laporan persediaan, kas masuk, kas keluar, dan aset tetap. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan pengelola untuk menyusun laporan keuangan yang terstruktur. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi fondasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. **Kata Kunci:** akuntabilitas; BUMDes; manajemen; transparansi.*

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa melalui berbagai unit usaha yang dikelola secara profesional (Nasfiza et al., 2024). Kehadiran BUMDes mampu mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan

lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat desa secara menyeluruh.

BUMDes Kalongan Jaya Mandiri, yang dikenal sebagai salah satu badan usaha desa dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi isu krusial untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini sangat penting karena laporan keuangan yang solid merupakan cerminan dari tata kelola yang baik. Untuk mendukung keberlanjutan bisnisnya, BUMDes Kalongan Jaya Mandiri perlu memperkuat sistem pelaporan keuangan konsolidasi. Pelaporan yang akuntabel tidak hanya berperan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan laporan keuangan yang terpercaya, BUMDes dapat menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang profesional dan terbuka (DARWIS, 2022; Pamungkas, 2023).

Kepengurusan BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Sebagai permodalan BUMDes berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, bantuan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pinjaman atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Pengelolaan BUMDes ini sejalan dengan salah satu misi yang telah dirumuskan yaitu mewujudkan masyarakat Desa Kalongan yang berkehidupan sejahtera dengan membangun BUMDes sebagai poros pembangunan (Ratna Dwi Jayanti & Musnurhadi, 2023; FK Pribadi et., 2023; Rachmawati ID, 2024).

Seiring dengan berkembangnya berbagai unit usaha di bawah naungan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya, pengelolaan keuangan menjadi semakin kompleks. Setiap unit usaha memiliki laporan keuangan masing-masing yang perlu dikonsolidasikan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan BUMDes secara keseluruhan. Tanpa sistem pelaporan yang baik, potensi kebocoran keuangan, ketidak efisienan dalam pengelolaan dana, serta kesulitan dalam perencanaan bisnis dapat meningkat (Ahmad, 2021; Rachmawati ID, 2024). Dalam konteks bisnis berkelanjutan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pelaporan yang terstruktur memungkinkan BUMDes untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang lebih baik, menarik investasi dari pihak ketiga serta memperkuat daya saing usaha di tingkat lokal maupun regional (Devananda & Darmawan, 2024; Afrida, 2016). Dengan adanya pelaporan keuangan yang baik, BUMDes dapat lebih mudah mengakses pendanaan dari lembaga keuangan atau program bantuan pemerintah yang sering kali mensyaratkan laporan keuangan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan (Aliah et al., 2022).

Namun, implementasi sistem pelaporan keuangan setiap unit di BUMDes Kalongan Mandiri Jaya masih menghadapi beberapa kendala (Natalia & Sujana, 2022; Ramayanti

& Fitri, 2023). Beberapa diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, kurangnya pemahaman terkait penyusunan keuangan, serta keterbatasan teknologi yang mendukung pencatatan keuangan secara sistematis (Abdul Malik Hakim & Sasongko, 2024). Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah strategis untuk memperkuat kapasitas SDM dalam bidang akuntansi, penerapan teknologi berbasis digital dalam pengelolaan keuangan, serta pembenahan sistem administrasi keuangan yang lebih modern (Jaya, 2024).

2. TINJAUAN LITERATUR

Akuntabilitas menurut Edowati et al. (2021) adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada pihak yang memberikan wewenang. Akuntabilitas merupakan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi pemerintah tersebut (Wicaksono, 2015). Pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian dan evaluasi adalah masyarakat dan pemerintah yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti pemerintah pusat.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pengelolaan dana desa. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama yaitu *answerability* adalah berhubungan dengan tuntutan bagi aparat pemerintah desa untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana menjalankan wewenang, arus sumber daya yang dipergunakan dan apa yang telah dicapai. Guy Peter menyebutkan ada 3 tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif dan akuntabilitas kebijakan publik.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan. Menurutnya akuntabilitas publik dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat luas). Akuntabilitas mengandung nilai kepuasan dari pihak stakeholders sebagai pihak yang memberi wewenang yang telah diberikan pemerintah.

Pendekatan pengabdian yang digunakan berbasis keterlibatan masyarakat dengan menerapkan metode pelatihan dan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan dalam aspek manajemen usaha dan keuangan. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pengurus BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Kalongan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat (Korten, 1987). Konsep ini melampaui sekadar pemberian bantuan, melainkan lebih menekankan pada

proses di mana masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang menyentuh kehidupan mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap nasib mereka sendiri.

Terdapat tiga aspek kunci dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas (*Enabling*): Tahap ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk berkembang. Ini termasuk penyediaan akses terhadap sumber daya, informasi, serta fasilitas yang dibutuhkan (Friedmann, 1992). Dalam konteks BUMDes, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan teknis, dan fasilitasi akses permodalan.
2. Peningkatan Potensi (*Empowering*): Aspek ini berfokus pada penguatan individu dan kelompok masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa (Chambers, 1997).
3. Perlindungan (*Protecting*): Pemberdayaan juga mencakup upaya untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan dampak negatif pembangunan. Hal ini dilakukan dengan membangun sistem yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan (Sastrawan, 2010).

BUMDes, seperti BUMDes Kalongan Jaya Mandiri, adalah implementasi konkret dari konsep pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui BUMDes, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pemilik dan pengelola usaha. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, misalnya, menjadi salah satu wujud dari pemberdayaan ini, karena masyarakat dapat turut serta mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan dana. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel secara langsung berkorelasi dengan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

3. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA merupakan bentuk pemecahan masalah yang mengacu pada kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi pada mitra. Metode ini dilaksanakan secara partisipatif dengan adanya kesinambungan dan partisipasi aktif antara tim pengabdian dan masyarakat pada mitra sasaran. Mitra sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Kalongan Mandiri Jaya). Metode PRA dilakukan dengan pengimplementasian dalam bentuk tutorial, diskusi, dan praktik. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan pada aspek manajemen dan keuangan dengan pengimplementasian IPTEK, sikap, dan luaran pada setiap aktivitas yang dapat dilihat pada tabel berikut

1. Pada tahap persiapan dilakukan dengan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dengan mitra, persiapan bahan pelatihan dan identifikasi pelaksanaan program.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dibuat sesuai dengan rancangan oleh tim pengabdian bersama pelaku pengurus BUMDes Kalongan Mandiri Jaya. Kegiatan pengabdian dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Agustus 2025. Berikut adalah tabel program kegiatan pengabdian dan implementasinya.

No.	Program	Kegiatan
1.	Pelatihan pencatatan akuntansi sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pencatatan keuangan di unit usaha telur bebek • Pelatihan pencatatan keuangan di unit usaha peternakan kambing • Pelatihan pencatatan keuangan di unit pengelolaan sampah
2.	Pendampingan pencatatan akuntansi sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan keuangan di unit usaha telur bebek • Penyusunan laporan keuangan di unit usaha peternakan kambing • Penyusunan laporan keuangan di unit pengelolaan sampah

3. Evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan pengabdian setelah selesai dilakukan melalui komunikasi secara langsung dan monitoring secara berkala, serta mengikuti perkembangan kegiatan dan kunjungan ke lokasi mitra minimal 5 kali. Indikator evaluasi akan sesuai dengan adanya kualitas dan kuantitas capaian luaran. Sebanyak 75% pengurus BUMDes menggunakan dan mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BUMDes Kalongan Jaya Mandiri. Keberhasilan ini dicapai melalui pendekatan dua tahap yang sistematis, yaitu pelatihan akuntansi sederhana dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Seluruh proses ini dijalankan dengan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, di mana pengurus BUMDes terlibat aktif dan menjadi subjek utama dalam setiap tahapan, memastikan solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Berikut merupakan

A. Pelatihan Akuntansi Sederhana

Pelatihan Akuntansi Sederhana yang dilaksanakan meliputi: 1) Pelatihan pencatatan keuangan di unit usaha telur bebek; 2) Pelatihan pencatatan keuangan di unit usaha peternakan kambing; dan 3) Pelatihan pencatatan keuangan di unit pengelolaan sampah. Pada tahap ini, materi yang disampaikan berfokus pada mengedukasi mitra terkait pencatatan keuangan yang rapi, benar, dan mudah dipahami. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan BUMDes yang transparan dan akuntabel, di mana setiap aliran dana dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Edukasi ini juga mencakup pentingnya pemisahan antara keuangan pribadi dan unit usaha, serta cara menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran sederhana.

Meskipun tujuan pelatihan sangat jelas, terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi selama proses pengabdian. Tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman dasar akuntansi dari para pengelola unit usaha. Banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan, sehingga konsep-konsep seperti neraca, laporan laba-rugi, atau bahkan perbedaan antara kas masuk dan pendapatan sering kali membingungkan. Selain itu, kurangnya motivasi dalam melakukan pencatatan secara rutin menjadi kendala lain. Kesibukan operasional sehari-hari di unit usaha sering kali mengesampingkan tugas administrasi, membuat pencatatan menjadi tidak konsisten. Tantangan terakhir adalah keterbatasan akses terhadap teknologi. Sebagian besar pengelola masih mengandalkan pencatatan manual di buku catatan yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, atau kesulitan dalam rekonsiliasi.

Namun, beberapa upaya strategis dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama, tim pengabdian menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan sederhana. Materi pelatihan tidak disajikan dalam bentuk teori akuntansi yang rumit, melainkan dalam format yang lebih visual dan interaktif. Contoh-contoh kasus yang digunakan diambil langsung dari kegiatan operasional mereka sehari-hari. Kedua, diberikan pendampingan intensif secara berkala setelah sesi pelatihan utama selesai. Pendampingan ini difokuskan pada praktik langsung di lapangan, membantu pengelola untuk menyelesaikan masalah pencatatan yang mereka temui secara *real-time*.



Gambar 1. Pelatihan Akuntansi Sederhana

Selanjutnya, pendampingan diarahkan pada pencatatan keuangan harian yang kini terintegrasi dengan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola aset ganda yang dimiliki oleh BUMDes. Tim pendampingan membantu pengelola dalam menyusun laporan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran. Sementara itu, pada unit pengelolaan sampah, pendampingan berfokus pada laporan pencatatan keuangan harian dengan melacak pendapatan yang bersumber dari jasa angkut sampah, serta biaya operasional seperti biaya bahan bakar dan upah pekerja. Pendampingan ini berhasil membantu pengelola membuat laporan yang lebih transparan, yang menunjukkan secara jelas berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari unit pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes terhadap pentingnya laporan keuangan yang sistematis. Setiap unit usaha kini memiliki laporan keuangan sederhana yang memberikan gambaran jelas mengenai kesehatan finansial mereka. Hal ini menjadi landasan penting untuk tahap selanjutnya, yaitu konsolidasi laporan keuangan BUMDes secara keseluruhan.



Gambar 5. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

5. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini berhasil mengatasi tantangan utama yang dihadapi BUMDes Kalongan Jaya Mandiri, yaitu keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan sistematis yang menggabungkan pelatihan akuntansi sederhana dan pendampingan intensif, tim pengabdian berhasil memberdayakan para pengelola di tiga unit usaha utama: telur bebek, peternakan kambing, dan pengelolaan sampah. Dua tahap utama pelaksanaan pengabdian, yaitu pelatihan dan pendampingan, terbukti efektif. Meskipun menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman dasar akuntansi dan keterbatasan teknologi, tim pengabdian menerapkan strategi inovatif, seperti penggunaan pendekatan praktis dan penyediaan *template* digital. Hasilnya, pengelola BUMDes kini memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu menyusun laporan keuangan dasar yang terstruktur, mulai dari laporan persediaan hingga catatan kas harian. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada

efisiensi operasional, tetapi juga menjadi landasan penting untuk konsolidasi laporan keuangan BUMDes secara keseluruhan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola BUMDes yang profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa dalam jangka panjang. Untuk keberlanjutan program, BUMDes disarankan untuk secara rutin mengadakan pelatihan penyegaran dan memanfaatkan aplikasi akuntansi digital yang lebih terjangkau. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga pendampingan profesional perlu diperkuat untuk memastikan pengelolaan keuangan BUMDes tetap relevan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemdiktisaintek yang telah mendanai pengabdian skema Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) dengan nomor kontrak DP2M 085/C3/DT.05.00/PM/2025. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang (LPPM UNNES), Pemerintah Desa Kalongan, dan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Kalongan Sejahtera.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Hakim, & Sasongko, N. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Tentang Pentingnya Pelaporan Keuangan Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(12), 8995–9001. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.5914>
- Ahmad, R. (2021). *Penyusunan Laporan Keuangan Yang Baik Dan Benar Bagi Pelaku Usaha/Bisnis*. 6, 2457–2462. <https://osf.io/preprints/suf5g/%0Ahttps://osf.io/suf5g/download>
- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan benar pada BUMDes. *Owner*, 6(3), 1457–1462. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.975>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts?: Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- DARWIS, I. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *OSF Preprints*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/49b2j>
- Devananda, N. P. H. A., & Darmawan, N. A. S. (2024). Strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja keuangan pada bumdesma (badan usaha milik desa bersama) (studi pada bumdesma setya dharma shanti lkd). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(2), 224–235. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i2.75762>

- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. MA: Blackwell Publishers.
- Jaya, F. (2024). Analisis Rasio Keuangan untuk Bisnis yang Berkelanjutan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 340–349. <https://doi.org/10.37481/jmeb.v4i1.712>
- Korten, D. C. (1987). *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. CT: Kumarian Press.
- Nasfiza, Y., Erlinda, S., & Supentri, S. (2024). Efektivitas Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sentajo Kerjasama Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sentajo. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4752–4758. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4393>
- Natalia, S., & Sujana, I. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32, 3552. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i12.p06>
- Pribadi FK, Yulianti R, Yusron A. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa. Parjhuga. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah*, 29-37. <https://doi.org/10.60128/parjhuga.v1i1.5>
- Rachmawati ID. (2024). Apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berhasil Meningkatkan Perekonomian Desa?: LITERATURE REVIEW. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, <https://doi.org/10.32477/jrabi.v4i2.1000>.
- Ratna Dwi Jayanti, & Musnurhadi. (2023). Pencatatan Pembukuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Guna Meminimalisir Permasalahan yang Dihadapi BUMDes Desa Wuluh. *SNEB : Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara*, 5(1), 103–108. <https://doi.org/10.26533/sneb.v5i1.1133>
- Sastrawan, I. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor.